KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Lebih Dari 60% Penghuni Lapas Terlibat Kasus Narkotika, Apa Solusinya?
Tanggal : Rabu, 07 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Lebih Dari 60% Penghuni Lapas Terlibat Kasus Narkotika, Apa Solusinya?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia merupakan narapidana yang terlibat kasus narkotika.

Yusril mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang membuat kapasitas Lapas terus terbebani. Menurutnya, pembangunan Lapas baru saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan kapasitas, apabila jumlah orang yang dipidana dalam perkara narkotika tetap tinggi.

"Ditambah sekarang sebanyak apa pun LP (Lapas) kita bangun, itu tetap enggak akan menampung. Kecuali kita melakukan suatu perubahan terhadap undang-undang narkotika sendiri," ujar Yusril dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah menyoroti kemungkinan pemberian amnesti bagi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan semestinya menjalani rehabilitasi. Namun, berdasarkan pengecekan di lapangan, Yusril menyebut banyak pengguna narkotika yang juga terlibat dalam peredaran narkotika.

"Jadi memang ya susah memilah-milah itu. Sedikit sekali yang betul-betul hanya menggunakan dan tidak ikut-ikut mengedarkan," kata Yusril.

Karena itu, menurut Yusril, diperlukan kajian mendalam apabila Pemerintah hendak mengubah Undang-Undang Narkotika.

"Perubahan terhadap undang-undang narkotika kalau seperti yang diinginkan Presiden itu diwujudkan, memang akan berkurang drastis penghuni lembaga pemasyarakatan itu dibandingkan dengan sekarang," tutur dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menjelaskan, praktik pemidanaan berdasarkan KUHP lama memang mengarahkan pelaku untuk dipenjara. Setelah ada pemahaman lebih jauh tentang kejahatan narkoba ini, lanjut Willy, Pemerintah membangun pusat-pusat rehabilitasi.

"Kini di KUHP baru, mulai menormakan rehabilitasi itu sebagai pilihan dalam pemidanaan," jelas Willy kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (6/10/2026).

Dia menambahkan, sudah lama praktik pidana narkotika ini menitikberatkan pada penahanan. Dia menegaskan, mulai dari yang tertangkap hanya sebagai pemakai, membawa, mengantar, hingga memproduksi dan memperdagangkan, semua diperlakukan sama, yakni ditahan.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira tidak menampik, bahwa mayoritas penghuni Lapas merupakan narapidana kasus narkotika. Menurut dia, peredaran narkoba di Indonesia sangat marak dan permintaan di Indonesia tinggi.

"Perbaikilah kehidupan masyarakat kita, maka Lapas pun sepi," ujar Andreas Hugo kepada *Rakyat Merdeka* melalui pesan *WhatsApp*, Selasa (6/10/2026).

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menegaskan, perlu adanya revisi Undang-Undang Narkotika agar penghuni Lapas tidak didominasi kasus narkotika. Menurut dia, pengguna narkotika sebaiknya tidak dipenjara.

"Pemerintah salah sendiri jika akhirnya Lapas penuh. Karena banyak menangkap para pengguna narkotika, lalu banyak menggunakan kasus narkotika pada pengguna tersebut," tegas Isnur kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (6/10/2026).

Untuk mengetahui pandangan Andreas Hugo Pareira dan Muhammad Isnur terkait lebih dari 60 persen penghuni Lapas merupakan narapidana kasus narkotika, berikut wawancaranya.

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

ANDREAS HUGO PAREIRA, Wakil Ketua Komisi XIII DPR

Rehabilitasi Juga Butuh Infrastruktur & Anggaran



> Lapas itu wajah masyarakat kita. Jadi, kalau ditanya mengapa banyak napi narkoba, napi pelanggaran seksual, napi korupsi, ya itulah wajah masyarakat kita.

Bagaimana Anda melihat lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) didominasi oleh narapidana kasus narkotika?

Lapas itu wajah masyarakat kita. Jadi, kalau ditanya mengapa banyak napi narkoba, napi pelanggaran seksual, napi korupsi, ya itulah wajah masyarakat kita. Perbaikilah kehidupan masyarakat kita, maka Lapas pun sepi.

Menurut Anda, hal apa yang dapat dilakukan Pemerintah agar kelebihan kapasitas di Lapas bisa teratasi?

Presiden sudah berkomitmen untuk memberikan amnesti kepada beberapa kategori warga binaan (WB), seperti pengguna narkoba, orang lanjut usia, dan beberapa kategori lainnya, dengan mempercepat pembebasan bersyarat. Di KUHAP yang baru pun ada peraturan yang berkaitan dengan hukuman kerja sosial. Kalau semua ini diterapkan, mestinya kekurangan kapasitas Lapas bisa dikurangi.

Menko Yusril menyampaikan, amnesti memiliki kendala karena jumlah napi yang banyak, sehingga untuk menyortir mana yang pengguna narkoba atau bukan masih sangat sulit. Ada tanggapan terkait ini?

Ya, sulit. Ada tantangan, pasti iya. Dan itu kerja teknis administratif. Tapi itu kan sudah keputusan politik Presiden. Kalau tidak dijalankan, apa nanti rakyat bilang hanya omon-omon, bagaimana?

Dari catatan Anda, apa penyebab lebih dari 60 persen penghuni Lapas ini adalah kasus narkotika?

Ya, karena memang peredaran narkoba di Indonesia sangat marak dan permintaan pun tinggi.

Kalau pengguna, jangan dipenjara, tetapi direhabilitasi. Bagaimana dengan itu?

Iya, teorinya memang begitu. Tetapi rehabilitasi sendiri pun perlu tempat, infrastruktur pendukung, dan tentunya anggaran.

Kalau Pemerintah tetap membangun Lapas meskipun ada penilaian Lapas banyak dihuni oleh napi narkotika. Apa tanggapan Anda terkait hal ini?

Iya, betul, setuju untuk membangun Lapas baru. Ada rencana untuk membangun Lapas Besar (Mega Prison) di salah satu pulau di Pantai Utara Jawa atau di Nusakambangan. ■ NNM

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

Pengguna Narkotika Harusnya Direhabilitasi



> Pemerintah harus memperbaiki di hulunya, detail hukumnya bagi pengguna narkotika. Selain itu, polisi juga jangan sembarang menangkap, jangan menjebak-jebak.

Bagaimana Anda melihat lebih dari 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) didominasi oleh narapidana kasus narkotika?

Iya, memang benar didominasi kasus narkotika. Menurut kami, selama ini Pemerintah tidak serius memperbaiki pola penanganan narkotika.

Maksudnya tidak serius?

Semua pengguna narkoba dibawa ke pengadilan. Seharusnya kan pengguna itu dibawa ke rehabilitasi. Pemerintah salah sendiri, jika akhirnya Lapas penuh karena banyak menangkap para pengguna narkotika. Lalu menggunakan kasus narkotika terhadap pengguna tersebut. Setelah itu, para pengguna diproses secara pidana dan dihukum ke penjara.

Jadi, menurut Anda, salah jika pengguna narkotika dijebloskan ke penjara?

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra harus menjelaskan lebih lanjut mengapa banyak pengguna narkotika dibawa ke penjara selama ini. Nah, itulah kesalahan dan kegagalan Pemerintah dalam menganalisis akar masalahnya.

Apa yang dapat dilakukan Pemerintah?

Pemerintah harus memperbaiki di hulunya, detail hukumnya bagi pengguna narkotika. Selain itu, polisi juga jangan sembarang menangkap, jangan menjebak-jebak.

Selain itu, apa penyebab Lapas masih didominasi kasus narkotika hingga terjadi kelebihan kapasitas?

Masalah kedua, narkotika ini banyak di *backup* oleh aparat penegak hukum.

Buktinya?

Kan banyak polisi jadi penjual narkotika, seperti dalam kasus Teddy Minahasa. Selain itu, kenapa narkotika sulit diberantas? Karena menjadi bisnis mafia-mafia yang diduga di-*backup* oleh APH. Jadi, menurut saya, berantas juga masalah kedua, yakni berantas aparat yang korupsi dan main-main dengan narkotika di belakangnya.

Apakah dengan cara-cara tersebut bisa mengurangi kelebihan kapasitas di Lapas?

Kalau soal Lapas yang semakin padat, solusinya ya bangun juga Lapasnya. Selama ini, Lapas juga sangat tidak seimbang dengan luas wilayah, kapasitas penduduk, dan jumlah pengadilan sehingga tidak seimbang. Jadi, memang Pemerintah harusnya membangun Lapas baru. ■ NNM